



► PILKADA DAMAI

## Pemkot Gandeng Tokoh dan Ormas Awasi Pesta Demokrasi

Pemkot Jogja melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan se-Kota Jogja untuk mewujudkan pilkada yang aman, tertib, sportif dan damai. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jogja, Wirawan Hario Yudo, mengatakan pemilu adalah jalan demokrasi yang dijalankan dengan kedamaian, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil melaksanakan pemilihan tanpa konflik besar.

"Pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024 harus membawa nilai-nilai positif yang bisa ditularkan ke berbagai lembaga lainnya. Sudah selayaknya pilkada digelar dengan aman dan damai," ujarnya dalam *Silaturahmi dan Sarasehan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan* di Pecel Yojo, Selasa (29/10).

Ia berharap Kota Jogja bisa menjadi barometer bagi daerah lain dalam



**Sejumlah peserta** mengikuti agenda *Silaturahmi dan Sarasehan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan* di Pecel Yojo, Selasa (29/10).

menunjukkan kedewasaan demokrasi. Ia meminta seluruh tokoh masyarakat untuk menjadi corong dalam memperkuat persatuan sosial dan

menyebarkan nilai-nilai positif di tengah masyarakat. "Mari bangun demokrasi dengan tatanan yang baik agar Kota Jogja tetap adem ayem tanpa

perselisihan. Kedewasaan demokrasi perlu ditunjukkan bersama," katanya. Koordinator Divisi Penanganan, Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pilkada, terlebih pada proses kampanye.

Menurutnya, selama masa kampanye berpotensi terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan.

Jantan juga menjelaskan potensi pelanggaran dalam pemilu yang perlu diwaspadai adalah praktik *money politics*. Regulasi yang ada membatasi kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran terkait politik uang.

Dalam UU No.6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan

uang, materi lain, atau janji untuk memengaruhi pemilih, baik untuk memilih maupun tidak memilih, dapat dikenakan sanksi pidana.

"Implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Bawaslu memiliki ruang gerak terbatas dalam penindakan jika tidak ada bukti yang cukup kuat, seperti saksi atau alat bukti yang meyakinkan," katanya.



Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Fatoni Siradja, menuturkan kampanye Pilkada 2024 di Kota Jogja berjalan dengan aman dan

damai. Dia berharap suasana kondusif ini terus terjaga hingga selesainya pilkada.

"Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan dan kedamaian selama proses demokrasi ini berlangsung. Kondisi adem ayem ini menjadi tanggung jawab bersama agar Jogja bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelenggarakan Pilkada yang aman dan tertib," ujarnya. (Lugas Subarkah/)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005